

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 237.641.326 orang (BPS 2010), dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49%. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan pertumbuhan wilayah, akan mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk dapat menambah beban berat bagi kota dalam rangka persiapan infrastruktur baru seperti pendidikan, kesehatan serta pelayanan-pelayanan perkotaan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menimbulkan berbagai macam permasalahan yang mengiringinya.<sup>(1)</sup>

Bersamaan dengan kenaikan jumlah penduduk, pendapatan juga mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan dan pengaruh pola hidup konsumtif telah mendorong masyarakat untuk mengikuti pola hidup berfoya-foya. Pola hidup ini mempunyai dua dampak bagi lingkungan hidup pertama pola hidup ini membutuhkan dana yang semakin besar. Untuk mendapatkan dana itu eksploitasi sumber daya alam makin meningkat misalnya pada hutan dan aliran sungai. Kedua tingkat konsumsi meningkat, mulai dari makanan dan kemasannya, limbah yang dihasilkan per orang semakin besar. Sementara itu, pendapatan masyarakat untuk menangani sampah masih terbatas, akibatnya, di kota-kota besar di Indonesia banyak sampah yang bertumpuk dan berserakan.<sup>(2)</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pengolahan sampah menyatakan bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dan juga dapat disebabkan oleh proses alam yang berbentuk padat serta terbagi menjadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Permasalahan ini menjadi hal yang paling menonjol dalam pengolahan sampah baik skala Daerah, Nasional maupun skala Internasional.<sup>(3)</sup>

Menurut laporan *Environmental Protection Agency (EPA)* US, di Amerika, produksi sampah plastik meningkat dari satu persen pada tahun 1960 menjadi 12 persen atau sekitar 30 juta ton pada 2008 dari jumlah total produksi sampah domestik negara ini. Kategori sampah plastik yang terbesar berasal dari kemasan dan wadah seperti botol minuman, tutup botol, botol sampo dan lainnya. Jenis sampah plastik juga ditemukan pada jenis barang plastik yang penggunaannya bertahan lama seperti pada peralatan perlengkapan dan perabotan, dan barang plastik yang penggunaannya tidak bertahan lama seperti, diaper, kantong plastik, cangkir sekali pakai, perkakas, dan perlengkapan medis. Sementara itu, Inggris memproduksi sedikitnya 3 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sebanyak 56 persen dari jumlah tersebut berasal dari kemasan, dan 75 persen (dari persentase kemasan) berasal dari sampah rumah tangga.<sup>(4)</sup>

Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia tahun 2008 Estimasi timbulan sampah di Indonesia yang berasal dari Sumatera, Jawa, Balinusa, Kalimantan, Sumapapua dengan jumlah 35,8 juta ton/tahun, sedangkan khusus pulau Sumatera estimasi timbulan sampah yaitu sebesar 8,7 juta ton/tahun. Estimasi total timbulan sampah berdasarkan jenisnya sampah dapur 22,4 juta ton/tahun, sampah plastik 5,4 juta ton/tahun dan sampah kertas 3,6 juta ton/tahun, sedangkan untuk estimasi sampah yang masuk ke TPA di wilayah Sumatera 2,5 juta ton/tahun sedangkan sisanya melakukan penanganan sampah dengan cara ditimbun, dibakar, di buang ke sungai, di buat kompos dan lain-lain. Data ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga penyumbang tertinggi dalam timbulan sampah dan untuk estimasi nilai total pengeluaran untuk persampahan di Indonesia adalah sebesar 2.342 miliar rupiah per tahun dengan estimasi biaya pengeluaran Rp. 10.070,- per orang per tahun.<sup>(2)</sup>

Menurut data BPS 2004 pengelolaan sampah 41,28 % sampah di buang ke TPA, 35,59% sampah dibakar, 14,01% sampah dibuang ke sungai, 7,97% sampah dikubur, 1,15% sampah diolah menjadi kompos. Data ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengolahan sampah, sebahagian besar masih menjadi beban TPA. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan

sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>(5)</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kuncoro Sejati yang ditulis dalam buku pengelolaan sampah terpadu 89,83 % responden tidak puas dengan penanganan sampah di Indonesia, 87,72% responden tidak puas dengan penanganan sampah dikota responden, 70,69% responden tidak memisahkan sampah dirumahnya, 91,67% responden membuang sampah sembarangan karena tidak ada tempat sampah, 94,64% responden tidak puas dengan peran dinas kebersihan.<sup>(6)</sup>

Lembaga dan instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai ke TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manajemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga di pengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan semakin besarnya kategori kota. Pelayanan persampahan juga dilaksanakan oleh dinas yang dalam hal ini juga berfungsi sebagai regulator dan operator.

Pelayanan sistem pengelolaan persampahan haruslah mampu menjangkau setiap anggota masyarakat yang ada di suatu daerah, baik masyarakat golongan mampu maupun mereka yang kurang mampu. Jumlah masyarakat yang terjangkau oleh pelayanan juga harus meningkat dari waktu ke waktu untuk mencapai sasaran pelayanan yang diharapkan, disamping itu pelayanan juga harus disediakan/diberikan dengan kualitas yang baik sehingga mampu menjamin tidak ditimbulkannya berbagai masalah gangguan, pencemaran, atau bahkan perusakan lingkungan, baik pada tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir.<sup>(7)</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ervan Santoso tentang peran dinas kebersihan dan pertamanan dalam peneglolaan kebersihan di pemerintah kota Surabaya tahun 2011 Jumlah sampah yang dihasilkan kota Surabaya adalah sekitar 9.675 m<sup>3</sup>/hari dan yang masuk ke TPA adalah sekitar 6.064 m<sup>3</sup>/hari sedangkan mengenai koordinasi dan pengawasan sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya kegiatan pemanfaatan sampah oleh masyarakat dan pengangkutan sampah yang rutin dilakukan setiap hari oleh Dinas tapi masih memerlukan pengawasan yang lebih.<sup>(8)</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ima Magfiroh dkk, tentang Analisa Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri PT. Pabrik Gula Tjoekir menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada tapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya peran dari masyarakat maupun pihak PG Tjoekir. Begitu pula dengan program yang dibuat, kurang mendapat respon yang baik. *Human Error* maupun sikap kurang peduli terhadap lingkungan menjadi kendalanya. Sinergi yang kurang berjalan dengan baik menyebabkan peran pemerintah dirasa belum maksimal.<sup>(9)</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Surahmah Asti dkk tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Peneglolaan Sampah Domestik Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukan bahwa kebijakan untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota DIY telah terbentuk badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah. Perubahan akibat pengelolaan sampah adalah lingkungan menjadi bersih, asri, dan nyaman serta mendatangkan manfaat ekonomi. Metode pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di DIY belum dituangkan dalam prosedur baku. Permasalahan sampah sudah menjadi perhatian bagi pemerintah daerah DIY, kebijakan telah didukung dengan program layanan, proyek, regulasi, dan insentif khusus untuk pengelolaan sampah.<sup>(10)</sup>

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk kota Padang kini telah mencapai 876.678 Jiwa (BPS Kota Padang, 2013) yang tersebar di 11 Kecamatan. Kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya yaitu Koto Tangah 174.567 Jiwa dengan luas daerah 232.25Km<sup>2</sup>, Kuranji 135.787 Jiwa dengan luas daerah 57.41Km<sup>2</sup>, Lubuk Begalung 113.217 jiwa dengan luas daerah 30.91Km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk

dengan jumlah terkecil Kecamatan Bungus Teluk Kabung 23.858 Jiwa dengan luas daerah 100.78 Km<sup>2</sup>.<sup>(11)</sup>

Seiring dengan bertambahnya besarnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kota Padang sampah yang dihasilkan dari aktifitas setiap harinya juga semakin meningkat. Menurut laporan akhir *master plan* pengelolaan persampahan kota Padang (2013), standar timbulan sampah Kota Padang untuk tahun 2013 adalah 1,76 l/o/h sehingga jumlah timbulan sampah Kota Padang dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa sebesar  $\pm$  1.583.570 l/h atau 1583,570 m<sup>3</sup>/h. Sementara itu jumlah sampah yang terangkut setiap harinya tidaklah sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam *master plan* pengelolaan sampah Kota Padang (2013), pada tahun 2008 sampah yang dihasilkan 820,82 m<sup>3</sup>/hari sedangkan sampah yang terangkut ke TPA adalah sebanyak 603 m<sup>3</sup>/hari atau sekitar 73,5% selain itu, pada tahun 2011 tingkat pelayanan untuk pengumpulan sampah adalah sebesar 72,78%. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan pengumpulan sampah masih di bawah Standar Pelayanan Minimal bagi kawasan perkotaan yaitu sebesar 80%. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang pada 15 Januari 2016 jumlah sampah yang terangkut ke TPA hanya 189,280 Ton dan ada 10 orang petugas yang tidak melaporkan hasil penimbangan/pengangkutannya.<sup>(12)</sup>

Menurut UU No 18 tahun 2008 dalam pasal 12 menyatakan bahwa Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.<sup>(5)</sup> Dari data timbulan sampah di atas menunjukkan meningkatnya jumlah sampah dan dapat diartikan masih rendahnya pengelolaan sampah pada sumber (individu atau rumah tangga). Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah dalam hal ini pemerintah Kota Padang juga mempertegas dan untuk mendukung kebersihan Kota, pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan ketat tentang pengelolaan sampah dengan diberlakukannya Perda No.21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan survey yang dilakukan di 11 Kelurahan di Kota Padang, peneliti menemukan masyarakat yang membuang sampah di sungai seperti yang ditemukan di daerah Kecamatan Nanggalo dekat jembatan bawah asam, di sungai bawah jembatan Palarik, dan masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah tidak pada jam yang telah ditetapkan pemda, masyarakat tidak meletakkan sampah di dalam kontainer melainkan di bawah kontainer dan merusak pemandangan di sekitar kontainer, tidak adanya pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik, bahkan ditemukannya limbah B3 seperti lampu dan baterai di kontainer.

Peneliti juga melakukan penghitungan Kepadatan Lalat di 3 TPS, TPS Banda Kali di Belakang UPI didapatkan hasil pengukuran kepadatan lalat 19,38, kemudian di TPS Perumahan Belimbing kepadatan lalat 17,89 dan terakhir di TPS jalan Menuju Asrama Haji Lubuk Buaya kepadatan lalat 12,48. Dari 42 titik TPS yang di pantau 7 kontainer telah mengeluarkan bau busuk dan mengeluarkan air lindi sedangkan kontainer terletak tidak jauh dari pemukiman warga, sungai dan jalan umum. TPS yang berada di badan sungai pada umumnya sampah sampai masuk ke badan sungai sehingga merusak estetika lingkungan.

Peneliti juga melakukan survey pada petugas pengangkut sampah, sampah yang berada di atas truk melebihi tinggi bak truk dan ada ditemukan beberapa truk tidak menutup sampah dengan jaring sehingga berkemungkinan sampah berserakan pada saat pengangkutan dan juga di TPA Air dingin, sampah yang dibawa baik dengan amroll maupun dumtruk setelah ditimbang langsung di buang ke TPA tanpa adanya pengolahan di TPA.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Peran Pemerintahan Kota Padang Terhadap Pengelolaan Sampah Tahun 2016.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Pemerintahan Kota Padang Terhadap Pengelolaan Sampah Tahun 2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mendeskripsikan peran Pemerintahan Kota Padang terhadap pengelolaan sampah Tahun 2016.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mendeskripsikan informasi tentang input pengelolaan sampah di Kota Padang yang meliputi kebijakan, tenaga, dana, sarana dan prasarana.
2. Mendeskripsikan informasi tentang proses pengelolaan sampah Kota Padang yang meliputi kegiatan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke TPA)
3. Mendeskripsikan informasi tentang output pengelolaan sampah Kota Padang yaitu penerapan, pelaksanaan dan pengelolaan sampah Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah kota padang

Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Padang dalam melakukan upaya pengelolaan sampah kota yang lebih baik

2. Bagi peneliti

Sebagai pengembangan ilmu yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Kota padang, dari bulan Februari 2016 – Juli 2016 untuk melihat gambaran tentang input, output dan proses pengelolaan sampah di Kota Padang tahun 2016. Dengan mengambil informan Walikota Padang, Ketua DPRD Komisi III, Kabid PK2L Bapedalda Kota Padang, Kasi program dan Pengendalian DKP Kota Padang, Dinas Kesehatan Kasi Sanitasi, Kabid KPASBM BPMPKB, Pimpinan Kecamatan sekota Padang.